

INDIKATOR STRATEGIS

PROVINSI SUMATERA BARAT

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

INDIKATOR STRATEGIS

PROVINSI SUMATERA BARAT

2018



Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2018

ISBN	: 978-602-6544-49-0
No. Publikasi	: 13560.1902
Katalog	: 1103019.13
Ukuran Buku	: 11,5 cm x 6,5 cm
Jumlah Halaman	: xx + 179 Hal.
Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Penyunting	: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Gambar Kover oleh	: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Diterbitkan oleh	: © BPS Provinsi Sumatera Barat
Dicetak oleh	: CV. Graphic Dwipa (Cetakan : 1)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat(UU No. 28 Tahun 2014

Tim Penyusun

Pengarah

Dr. Ir. Sukardi, M.Si.

Editor

1. Ichsan, S.S.T
2. Teguh Sugiyarto, Ph.D.
3. Krido Saptono, S.Si, M.Si
4. Hefinanur, S.E, M.E.
5. Faizal A, S.E, M.Si.
6. Dicky Harryadi, S.E, M.E.
7. Erna Nurmayanti, SST, MT
8. Lidya Sri Yeni, SST, M.Si
10. Dewi Astuti, SST, M.Stat
11. Hani Setiani, SST, M.Si
12. Sedwivia Ridena, SST
13. Mila Artati, S.Si, M.Stat

Penyusun

Deswaty, SST

<https://sumbar.bk>

PETA ADMINISTRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT



Legende

Provinsi

Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Perumahan

Rel Kereta Api

Road

Perairan

Perairan Besar

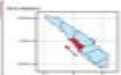
Perairan Kecil

Perairan Sangat Kecil

Perairan Sangat Sangat Kecil

Perairan Sangat Sangat Sangat Kecil

Perairan Sangat Sangat Sangat Sangat Kecil



Wilayah Administrasi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Sumatera Barat

Kecamatan Sumatera Barat

Desa Sumatera Barat

Perumahan Sumatera Barat

Rel Kereta Api Sumatera Barat

Road Sumatera Barat

Perairan Sumatera Barat

Perairan Besar Sumatera Barat

Perairan Kecil Sumatera Barat

Perairan Sangat Kecil Sumatera Barat

Perairan Sangat Sangat Kecil Sumatera Barat

Perairan Sangat Sangat Sangat Kecil Sumatera Barat

Perairan Sangat Sangat Sangat Sangat Kecil Sumatera Barat



Sumatera Barat

<https://sumbar.biz>

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2018 ini sengaja dibuat dalam format buku saku untuk mempermudah pengguna data dalam mengakses indikator-indikator pokok dan penting Provinsi Sumatera Barat kondisi terkini. Publikasi ini memuat data-data tahun 2018.

Sebagian besar data dalam publikasi ini merupakan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan survei dan sensus oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, kami harapkan data-data yang telah dihasilkan dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Saran yang konstruktif untuk kemajuan publikasi sejenis pada masa yang akan datang sangat kami hargai. Semoga bermanfaat.

Padang, April 2019
Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat

Kepala


Dr. Ir. SUKARDI, M.Si

<https://sumbar.biz>

DAFTAR ISI

1. GEOGRAFI	1
Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kab./Kota di Sumatera Barat Tahun 2018	3
Tabel 1.2. Rekap Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2018.....	5
Tabel 1.3. Pemekaran Daerah di Sumatera Barat	8
2. KEPENDUDUKAN.....	9
Tabel 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2010-2018	11
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2018 (orang)	12
3. KEMISKINAN	15
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2010-2018.....	17

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Indonesia Menurut Bulan Maret dan September Tahun 2010-2018	21
Tabel 3.3. Garis Kemiskinan Sumatera Barat dan Indonesia, 2010-2018	23
Tabel 3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Sumatera Barat, 2010-2018	26
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin , P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	28
4. GINI RATIO	31
Tabel 4.1. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Barat, 2010-2018	33
Tabel 4.2. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018.....	34
5. KETENAGAKERJAAN.....	37
Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumbar dan Indonesia,	

2010-2018.....	39
Tabel 5.2. Persentase Penduduk Bekerja Sumbar dan Indonesia, 2010-2018.....	41
Tabel 5.3. Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia, 2010-2018.....	42
Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke-atas Sumbar dan Indonesia, 2010-2018.....	43
Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia (orang), 2010-2018.....	44
6. PENGANGGURAN.....	47
Tabel 6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar dan Indonesia, 2010-2018.....	49
Tabel 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2015, 2017 dan 2018.....	51

7. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM), ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK), ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)	53
Tabel 7.1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Barat Tahun 2016 -2018.....	55
Tabel 7.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2018	57
Tabel 7.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2018	59
8. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	61
Tabel 8.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Provinsi Sumatera Barat 2016-2018	63
Tabel 8.2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2018.....	65

9. INDEKS KEBAHAGIAAN	69
Tabel 9.1. Indeks Kebahagiaan Menurut Karakteristik di Sumatera Barat Tahun 2017.....	71
10. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	73
Tabel 10.1 Indeks Pembangunan Gender dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018.....	75
Tabel 10.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017.....	77
11. INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ...	79
Tabel 11.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2016.....	80
12. INDEKS DEMOKRSI INDONESIA (IDI) SUMATERA BARAT	81

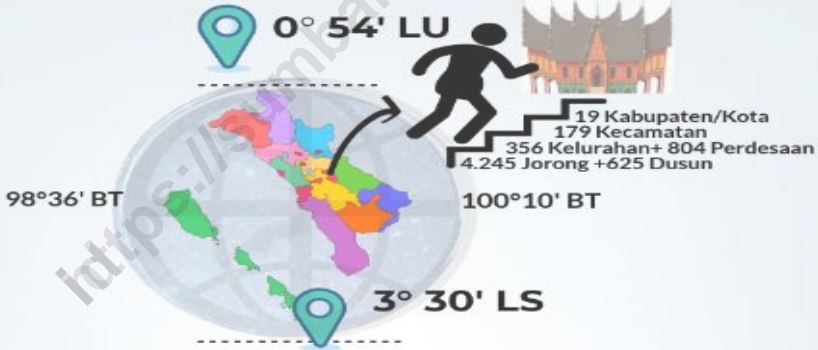
Tabel 12.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat, 2009-2017 ...	83
13. INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)	85
Tabel 13.1 Persentase Desa dan Jumlah Desa Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Sumatera Barat, 2014 dan 2018	87
Tabel 13.2 Kemandirian Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa Provinsi Sumatera Barat 2014-2018.....	88
14. UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP).....	89
Tabel 14.1 Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat, 2010-2018	90
15. PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA.....	93
Tabel 15.1 Jumlah Produksi Padi menurut Kab/kota di Sumatera Barat(ton), 2015 - 2018.....	95
Tabel 15.2 Jumlah Produksi Palawija menurut Kab/kota di Sumatera	

Barat(ton), 2018	97
Tabel 15.3 Luas Panen, Produksi GKG, Produksi Beras dan Konsumsi Beras dan Neraca 2018 (Metode KSA).....	99
16. INFLASI	101
Tabel 16.1 Inflasi Padang, Bukittinggi, Gabungan Dua Kota, dan Indonesia per Bulan 2018	103
Tabel 16.2 Inflasi Padang, Bukittinggi, Gabungan Dua Kota, dan Indonesia 2014-2018.....	105
17. PARIWISATA	107
Tabel 17.1 Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2018 per Bulan.....	109
Tabel 17.2 Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2012-2018.....	113

18. EKSPOR IMPOR.....	115
Tabel 18.1 Volume dan Nilai Ekspor Impor 2013-2018.....	117
Tabel 18.2 Volume dan Nilai Ekspor Impor per Bulan Tahun 2018	119
19. TRANSPORTASI	123
Tabel 19.1 Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara 2013-2018	125
Tabel 19.2 Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara per Bulan Tahun 2018	127
20. NILAI TUKAR PETANI (NTP) DAN NILAI TUKAR USAHA PETANI (NTUP).131	
Tabel 20.1 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2014-2018.....	133
Tabel 20.2 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Sumatera Barat dan Indonesia per Bulan Tahun 2018	135

21. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	139
Tabel 21.1 Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015- 2018.....	141
22. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	143
Tabel 22.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Sumbar dan Indonesia Tahun 2010-2018	145
Tabel 22.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumbar, dan Kab/Kota se- Sumbar Tahun 2015-2017	147
Tabel 22.3 Kontribusi PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2015- 2018.....	149
Tabel 22.4 Kontribusi PDRB Sumbar menurut Pengeluaran Tahun 2015 - 2018.....	151
Tabel 22.5 PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017	152

23. SENSUS EKONOMI 2016 (SE-2016) - LISTING	155
Tabel 23.1 Jumlah Usaha/Perusahaan Hasil SE2016 menurut Kategori dan Lokasi Usaha (usaha)	158
Tabel 23.2 Persentase Jumlah Usaha Hasil SE2016 menurut Kategori.....	161
Tabel 23.3 Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (usaha).....	163
Tabel 23.4 Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (orang).	166
Tabel 23.5 Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota (usaha).....	168
Tabel 23.6 Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota di Sumatera Barat (orang).....	170
24. SENSUS EKONOMI 2016 (SE-2016)-LANJUTAN	173
Tabel 24.1 Jumlah dan Persentase UMK dan UMB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017.....	174
Tabel 24.2 Banyaknya Usaha / Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha, 2017	176
Tabel 24.3. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja dan Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori di Provinsi Sumatera Barat, 2017	178



Infografis

Kependudukan Sumatera Barat 2018



PENDUDUK
SUMATERA BARAT

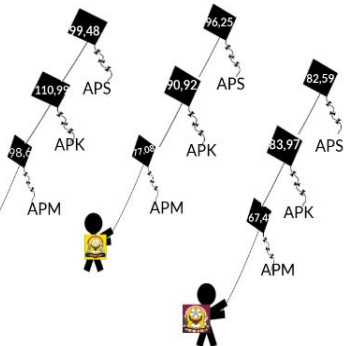


5,47

Juta Jiwa



Juta Jiwa



1. GEOGRAFI

Secara astronomis,

Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ}54'$ Lintang Utara dan $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $98^{\circ}36'$ – $101^{\circ}53'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0° .

Berdasarkan posisi geografisnya,

Provinsi Sumatera Barat memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Sumatera Utara dan Riau; Selatan - Samudera Hindia; Barat - Samudera Hindia; Timur – Provinsi Jambi dan Bengkulu.

Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, yaitu:

- Kabupaten: Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat.
- Kota: Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman.

Tabel 1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kab./Kota di Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang	Bujur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab.Kep.Mentawai	6 011,35	0°50' LS - 3°30' LS	97°30' BT - 100°30' BT
2	Kab.Pesisir Selatan	5 794,95	0°59' LS - 2°28' LS	100°19'BT - 100°18'BT
3	Kab.Solok	3 738,00	0°31' LS - 1°19' LS	100°27' BT - 101°15 BT
4	Kab.Sijunjung	3 130,80	0°18' LS - 1°42' LS	100°42' BT - 100°52' BT
5	Kab.Tanah Datar	1 336,00	0°17' LS - 3°39' LS	100°19' BT - 100°51' BT
6	Kab.Padang Pariaman	1 328,79	0°11' LS - 03°30' LS	98°36' BT - 101°53' BT
7	Kab.Agam	2 232,30	0°02' LS - 00°29' LS	99°52' BT - 100°33' BT
8	Kab.Lima Puluh Kota	3 354,30	0°22' LU - 0°23' LS	100°16' BT - 100°51' BT
9	Kab.Pasaman	4 447,63	0°55' LU - 0°06' LS	99°45' BT - 100°21' BT

bersambung...

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang	Bujur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kab.Solok Selatan	3 346,20	0°43' LS - 01°43' LS	101°01' BT - 101°30' BT
11	Kab.Dharmasraya	2 961,13	0°47' LS - 03°42' LS	101°09' BT - 101°54' BT
12	Kab. Pasaman Barat	3 387,77	0°30' LS - 0°11' LS	99°10' BT - 100°04' BT
13	Kota Padang	694,96	0°44' LS - 01°08' LS	100°05' BT - 100°34' BT
14	Kota Solok	57,64	0°32' LS - 0°42' LS	100°32' BT - 101°41' BT
15	Kota Sawahlunto	273,45	0°33' LS - 0°43' LS	100°43' BT - 100°50' BT
16	Kota Padang Panjang	23,00	0°27' LS - 0°30' LS	100°20' BT - 100°27' BT
17	Kota Bukittinggi	25,24	01°16' LS - 0°19' LS	100°21' BT - 100°25' BT
18	Kota Payakumbuh	80,43	0°10' LS - 0°17' LS	100°35' BT - 100°45' BT
19	Kota Pariaman	73,36	0°33' LU - 0°04' LS	100°04' BT - 100°10' BT
	Sumatera Barat	42 297,30	0°54' LU - 3°30' LS	98°36' BT - 100°10' BT

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka

Tabel 1.2. Rekap Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Nagari			Jorong	Dusun	RT
			Perkotaan	Perdesaan	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	10	2	41	43	-	341	-
2	Kab. Pesisir Selatan	15	11	171	182	480	-	-
3	Kab. Solok	14	2	72	74	414	-	-
4	Kab. Sijunjung	8	3	59	62	299	5	-
5	Kab. Tanah Datar	14	10	65	75	395	-	-
6	Kab. Padang Pariaman	17	29	74	103	593	-	-

bersambung...

Lanjutan Tabel 1.2.

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Nagari			Jorong/Korong	Dusun	RT
			Perkotaan	Perdesaan	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Kab. Agam	16	19	63	82	477	-	-
8	Kab. Lima Puluh Kota	13	4	75	79	414	-	-
9	Kab. Pasaman	12	4	33	37	225	-	-
10	Kab. Solok Selatan	7	6	33	39	269	-	-
11	Kab. Dharmasraya	11	14	38	52	461	-	-
12	Kab. Pasaman Barat	11	2	17	19	218	-	-

bersambung...

Lanjutan Tabel 1.2

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Nagari			Jorong/ Korong	Dusun	RT
			Perkotaan	Perdesaan	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Kota Padang	11	95	9	104	-	-	3 413
14	Kota Solok	2	12	1	13	-	-	140
15	Kota Sawahlunto	4	20	17	37	-	107	64
16	Kota Padang Panjang	2	14	2	16	-	-	222
17	Kota Bukittinggi	3	24	-	24	-	-	337
18	Kota Payakumbuh	5	34	14	48	-	-	172
19	Kota Pariaman	4	51	20	71	-	168	85
	TOTAL	179	356	804	1 160	4 245	625	4 433

Sumber : Master File Desa BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.3. Pemekaran Daerah di Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Daerah Induk	Tanggal Terbentuk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab.Kepulauan Mentawai	Kab. Padang Pariaman	4 Oktober 1999
2	Kota Pariaman	Kab. Padang Pariaman	10 April 2002
3	Kab. Pasaman Barat	Kab. Pasaman	18 Desember 2003
4	Kab. Dharmasraya	Kab. Sijunjung	18 Desember 2003
5	Kab. Solok Selatan	Kab. Solok	18 Desember 2003

Sumber : Harian Padek 2008

2. KEPENDUDUKAN

Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Data yang digunakan BPS saat ini adalah Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035.

Sensus Penduduk

Informasi yang biasa dikumpulkan dengan penghitungan lengkap misalnya nama, jenis kelamin dan umur, sedangkan informasi yang lebih detail seperti hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, kelahiran, perpindahan, dan informasi tentang kondisi rumah dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel.

Survei Penduduk Antar Sensus

Informasi yang dikumpulkan dari survei ini sebagian besar adalah sama dengan yang dikumpulkan dengan menggunakan penghitungan sampel dari sensus penduduk menyangkut kelahiran dan kematian.

Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Dalam dua survei ini, informasi tentang kelahiran, kematian, kesehatan dan keluarga berencana adalah yang paling utama diperhatikan. Dengan memperhatikan kelahiran, survei ini mengumpulkan informasi tentang latar belakang responden, sejarah kelahiran, preferensi kelahiran, pemberian ASI, pengetahuan dan praktek dari keluarga berencana, dan pekerjaan responden.

Registrasi Penduduk

Informasi dikumpulkan dalam registrasi penduduk adalah kejadian vital seperti kelahiran, kematian dan migrasi, yang dialami oleh individu tertentu atau rumah tangga dan dilaporkan pada perangkat desa.

Tabel 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2010-2018

Tahun	Penduduk (orang)			Sex Ratio	Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	2 409 196	2 456 135	4 865 331	98,09	0,77
2011	2 445 312	2 487 800	4 933 112	98,29	1,39
2012	2 480 901	2 519 283	5 000 184	98,48	1,36
2013	2 515 942	2 550 534	5 066 476	98,64	1,33
2014	2 550 392	2 581 490	5 131 882	98,80	1,29
2015	2 584 192	2 612 097	5 196 289	98,93	1,26
2016	2 617 273	2 642 255	5 259 528	99,05	1,22
2017	2 649 599	2 671 890	5 321 489	99,17	1,18
2018	2 681 113	2 700 964	5 382 077	99,27	1,14

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2018 (orang)

No.	Kab./Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Kab. Kep. Mentawai	46 998	43 375	90 373
02.	Kab. Pesisir Selatan	228 571	232 145	460 716
03.	Kab. Solok	183 592	187 513	371 105
04.	Kab. Sijunjung	117 178	116 632	233 810
05.	Kab. Tanah Datar	169 808	177 599	347 407
06.	Kab. Padang Pariaman	203 602	209 670	413 272
07.	Kab. Agam	240 226	247 688	487 914
08.	Kab. Lima Puluh Kota	188 472	191 042	379 514
09.	Kab. Pasaman	138 225	140 255	278 480
10.	Kab. Solok Selatan	84 995	83 416	168 411
11.	Kab. Dharmasraya	125 278	116 293	241 571
12.	Kab. Pasaman Barat	220 325	215 287	435 612

bersambung...

Lanjutan Tabel 2.2

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Kota Padang	469 737	469 375	939 112
14.	Kota Solok	34 611	35 165	69 776
15.	Kota Sawahlunto	30 820	31 078	61 898
16.	Kota Padang Panjang	26 402	26 592	52 994
17.	Kota Bukittinggi	62 484	66 299	128 783
18.	Kota Payakumbuh	66 512	67 191	133 703
19.	Kota Pariaman	43 277	44 349	87 626
Sumatera Barat		2 681 113	2 700 964	5 382 077

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035

<https://sumbar.biz>

3. KEMISKINAN

Penduduk Miskin

Konsep :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2010-2018

Tahun	Kemiskinan (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	9,44	-	13,33	-
2011	9,04	8,99	12,49	12,36
2012	8,19	8,00	11,96	11,66
2013	8,14	7,56	11,37	11,47
2014	7,41	6,89	11,25	10,96

bersambung...

Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Lanjutan Tabel 3.1

Tahun	Kemiskinan (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	7,31	6,71	11,22	11,13
2016	7,09	7,14	10,86	10,70
2017	6,87	6,75	10,64	10,12
2018	6,65	6,55	9,82	9,66

Sumber : Berita Resmi Statistik

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Indonesia Menurut Bulan Maret dan September Tahun 2010-2018

Tahun	Jumlah penduduk miskin			
	Sumatera Barat (ribuan orang)		Indonesia (juta orang)	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	430,02	-	31,02	-
2011	442,08	441,80	30,02	28,55
2012	407,95	401,52	29,13	28,59
2013	411,12	384,08	28,07	28,55
2014	379,20	354,74	28,28	27,73

bersambung...

Lanjutan Tabel 3.2

Tahun	Jumlah penduduk miskin			
	Sumbar (ribuan orang)		Indonesia (juta orang)	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	379,61	349,53	28,59	28,51
2016	371,56	376,51	28,01	27,76
2017	364,51	359,99	27,77	26,58
2018	357,13	353,24	25,95	25,67

Sumber : Berita Resmi Statistik

Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.3. Garis Kemiskinan Sumatera Barat dan Indonesia, 2010-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	254 432	-	211 726	-
2011	261 719	276 000	233 740	243 729
2012	277 784	292 052	248 707	259 520
2013	305 502	336 606	271 626	292 951
2014	349 656	365 827	302 735	312 328
2015	384 277	403 947	330 776	344 809

bersambung...

Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2018

Lanjutan Tabel 3.3

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	425 141	438 075	354 386	361 990
2017	453 612	455 797	374 478	387 160
2018	476 554	485 633	401 220	410 670

Sumber : Berita Resmi Statistik

Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Tabel 3.4. Indeks Keperahan Kemiskinan (P1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Sumatera Barat, 2010-2018

Tahun	Bulan	P1 (%)			P2 (%)		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2010	Maret	1,156	1,672	1,495	0,274	0,391	0,351
	September	-	-	-	-	-	-
2011	Maret	1,254	1,422	1,357	0,349	0,356	0,353
	September	0,881	1,895	1,502	0,219	0,564	0,430
2012	Maret	0,942	1,248	1,129	0,213	0,343	0,293
	September	1,132	1,300	1,235	0,296	0,322	0,312
2013	Maret	0,999	1,019	1,011	0,238	0,191	0,209
	September	1,116	1,363	1,267	0,292	0,313	0,305

bersambung...

Lanjutan Tabel 3.4

Tahun	Bulan	P1 (%)			P2 (%)		
		Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014	Maret	0,654	1,122	0,940	0,125	0,278	0,219
	September	0,536	0,888	0,751	0,096	0,181	0,148
2015	Maret	0,785	1,104	0,98	0,161	0,224	0,211
	September	1,056	1,39	1,26	0,25	0,32	0,29
2016	Maret	0,752	1,334	1,096	0,153	0,304	0,242
	September	1,038	1,180	1,122	0,249	0,299	0,278
2017	Maret	0,752	1,175	1,000	0,157	0,278	0,228
	September	0,599	1,275	0,990	0,107	0,324	0,233
2018	Maret	0,663	1,329	1,035	0,142	0,320	0,242
	September	0,884	1,025	0,959	0,212	0,214	0,213

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin , P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No.	Kab/Kota	Penduduk Miskin (000) orang	Persentase Penduduk Miskin	P1 (Indeks Kedalaman)	P2 (Indeks Keparahan)	Garis Kemiskinan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kep. Mentawai	12,99	14,44	2,42	0,61	294 284
2	Kab. Pesisir Selatan	34,92	7,59	0,77	0,13	409 882
3	Kab. Solok	32,89	8,88	1,40	0,35	408 570
4	Kab. Sijunjung	16,55	7,11	0,88	0,17	379 046
5	Kab. Tanah Datar	18,48	5,32	0,87	0,19	369 833
6	Kab. Padang Pariaman	33,20	8,04	1,25	0,29	402 960
7	Kab. A g a m	32,92	6,76	1,13	0,31	341 372
8	Kab. Lima Puluh Kota	26,47	6,99	1,09	0,24	388 689
9	Kab. P a s a m a n	20,31	7,31	0,93	0,22	334 800
10	Kab. Solok Selatan	11,85	7,07	1,03	0,23	364 498
11	Kab. Dharmasraya	15,42	6,42	0,70	0,15	414 096
12	Kab. Pasaman Barat	31,83	7,34	1,22	0,30	402 877

Lanjutan Tabel 3.5.

No.	Kab/Kota	Penduduk Miskin (000) orang	Persentase Penduduk Miskin	P1 (Indeks Kedalaman)	P2 (Indeks Keparahan)	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Kota Padang	44,04	4,70	0,73	0,17	507 042
14	Kota Solok	2,29	3,30	0,42	0,09	414 673
15	Kota Sawahlunto	1,48	2,39	0,27	0,07	354 665
16	Kota Padang Panjang	3,11	5,88	0,88	0,22	438 075
17	Kota Bukittinggi	6,32	4,92	0,39	0,06	459 371
18	Kota Payakumbuh	7,69	5,77	0,71	0,15	462 243
19	Kota Pariaman	4,40	5,03	0,68	0,16	431 368
	Sumatera Barat	357,13	6,65	1,04	0,24	476 554

Sumber : Susenas Maret 2018

<https://sumbar.bk>

4. GINI RATIO

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Interpretasi

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel 4.1. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Barat, 2010-2018

Tahun	Gini Ratio			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	0,325	-	0,378	-
2011	0,353	0,332	0,410	0,388
2012	0,364	0,355	0,410	0,413
2013	0,363	0,351	0,413	0,406
2014	0,334	0,332	0,406	0,414
2015	0,342	0,319	0,408	0,402
2016	0,331	0,312	0,397	0,394
2017	0,318	0,312	0,393	0,391
2018	0,321	0,305	0,389	0,384

Sumber : website <https://www.bps.go.id>

Tabel 4.2. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Kep. Mentawai	0,276	0,306	0,319	0,306
2	Kab. Pesisir Selatan	0,275	0,269	0,299	0,255
3	Kab. Solok	0,289	0,310	0,294	0,303
4	Kab. Sijunjung	0,295	0,325	0,333	0,300
5	Kab. Tanah Datar	0,332	0,302	0,262	0,288
6	Kab. Padang Pariaman	0,298	0,258	0,280	0,296
7	Kab. Agam	0,313	0,285	0,279	0,257
8	Kab. Lima Puluh Kota	0,326	0,268	0,262	0,283
9	Kab. Pasaman	0,302	0,297	0,260	0,266
10	Kab. Solok Selatan	0,384	0,307	0,299	0,309
11	Kab. Dharmasraya	0,356	0,300	0,252	0,264
12	Kab. Pasaman Barat	0,288	0,311	0,286	0,290

bersambung...

Lanjutan Tabel 4.2

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Kota Padang	0,350	0,350	0,338	0,344
14	Kota Solok	0,337	0,343	0,299	0,296
15	Kota Sawahlunto	0,333	0,318	0,299	0,310
16	Kota Padang Panjang	0,372	0,381	0,300	0,290
17	Kota Bukittinggi	0,340	0,329	0,313	0,337
18	Kota Payakumbuh	0,370	0,340	0,303	0,302
19	Kota Pariaman	0,331	0,338	0,301	0,316
Sumatera Barat		0,342	0,331	0,318	0,321

Sumber : Susenas Maret

<https://sumbar.biz>

5. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

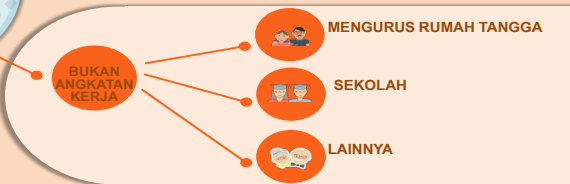
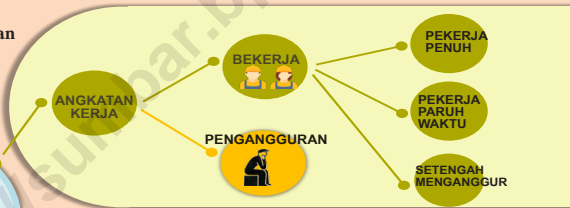
Tabel 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumbar dan Indonesia, 2010-2018

Tahun	TPAK (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010 *	66,39	66,36	67,83	67,72
2011 *	70,00	65,33	70,01	66,78
2012 *	69,98	64,42	69,59	67,76
2013 *	70,33	62,92	69,15	66,77
2014	70,58	65,19	69,17	66,60
2015	68,73	64,56	69,50	65,76
2016	70,34	67,08	68,06	66,34
2017	70,42	66,29	69,02	66,67
2018	72,80	67,26	69,20	67,26

Catatan : * : Tahun 2011-2013 *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi SP 2010 -2035

Sumber : Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Bagan Ketenagakerjaan



Tabel 5.2. Persentase Penduduk Bekerja Sumbar dan Indonesia, 2010-2018

Tahun	Penduduk Bekerja (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010 *	61,37	61,75	62,80	62,89
2011 *	63,41	60,09	65,14	61,79
2012 *	65,46	60,13	65,15	63,61
2013 *	65,83	58,50	65,08	62,66
2014	66,12	60,95	65,23	62,64
2015	64,61	60,11	65,46	61,70
2016	66,25	63,66	64,31	62,62
2017	66,34	62,59	65,34	63,01
2018	68,76	63,53	65,65	63,66

Catatan : * : Tahun 2011-2013 *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi SP 2010 -2035

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Bukan Angkatan Kerja Sumbar dan Indonesia, 2010-2018

Tahun	Penduduk Bukan Angkatan Kerja (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010 *	33,61	33,64	32,17	32,28
2011 *	31,44	34,67	29,99	33,22
2012 *	30,00	35,58	30,41	32,24
2013 *	29,67	37,08	30,85	33,23
2014	29,42	34,81	30,83	33,40
2015	31,27	35,44	30,50	34,24
2016	29,66	32,92	31,94	33,66
2017	29,58	33,71	30,98	33,33
2018	27,20	32,74	30,80	32,74

Catatan : * : Tahun 2011-2013 *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi SP 2010 -2035

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2018

Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke-atas Sumatera Barat dan Indonesia, 2010-2018

Tahun	Penduduk 15 tahun + (orang)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010 *	3 423 721	3 306 264	171 017 416	172 070 339
2011 *	3 385 218	3 414 532	172 007 409	173 851 717
2012 *	3 437 981	3 468 044	175 065 229	176 873 832
2013 *	3 491 335	3 523 167	178 130 470	179 967 361
2014	3 545 970	3 577 219	181 169 972	182 992 204
2015	3 609 544	3 634 236	184 599 615	186 100 917
2016	3 663 833	3 688 126	187 600 634	189 096 722
2017	3 717 416	3 746 830	190 587 918	192 079 416
2018	3 766 922	3 794 398	193 544 922	194 779 441

Catatan : * : Tahun 2011-2013 *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi SP 2010 -2035

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Sumatera Barat dan Indonesia (orang), 2010-2018

Tahun	Penduduk Angkatan Kerja			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010 *	2 273 111	2 194 040	115 998 062	116 527 546
2011 *	2 320 752	2 230 622	120 425 761	116 097 701
2012 *	2 406 659	2 234 007	121 819 813	119 849 734
2013 *	2 455 354	2 216 687	123 170 509	120 172 003
2014	2 502 702	2 331 993	125 316 991	121 872 931
2015	2 480 828	2 346 163	128 301 588	122 380 021

bersambung...

Lanjutan Tabel 5.5

Tahun	Penduduk Angkatan Kerja			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	2 577 041	2 473 814	127 671 869	125 443 748
2017	2 617 874	2 483 675	131 544 111	128 062 746
2018	2 742 269	2 552 130	133 939 099	131 005 641

Catatan : * : Tahun 2011-2013 *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi SP 2010 -2035

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

<https://sumbar.biz>

6. PENGANGGURAN

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

$$\text{TPT} = \text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%$$

TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk.

Penganggur terbuka

terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat dan Indonesia, 2010-2018

Tahun	TPT (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010*	7,57	6,95	7,41	7,14
2011*	7,51	8,02	6,96	7,48
2012*	6,49	6,65	6,37	6,13
2013*	6,39	7,02	5,88	6,17
2014	6,32	6,50	5,70	5,94
2015	5,99	6,89	5,81	6,18

bersambung...

Lanjutan Tabel 6.1

Tahun	TPT (%)			
	Sumatera Barat		Indonesia	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	5,81	5,09	5,50	5,61
2017	5,80	5,58	5,33	5,50
2018	5,55	5,55	5,13	5,34

Catatan : * : Tahun 2011-2013 *Backcasting* dengan penimbang Proyeksi SP 2010 -2035

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tabel 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, 2015, 2017 dan 2018

No.	Kabupaten/Kota	TPT (%)		
		2015	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
1	Kab.Kep.Mentawai	1,25	1,96	2,27
2	Kab.Pesisir Selatan	11,69	5,95	5,85
3	Kab.Solok	3,97	6,05	5,92
4	Kab.Sijunjung	4,26	3,32	3,20
5	Kab.Tanah Datar	4,46	3,72	3,86
6	Kab.Padang Pariaman	5,80	6,65	6,90
7	Kab.Agam	6,05	4,23	4,82
8	Kab.Lima Puluh Kota	3,78	2,60	2,70
9	Kab.Pasaman	5,06	6,81	5,88

bersambung...

Lanjutan Tabel 6.2

No.	Kabupaten/Kota	TPT (%)		
		2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kab.Solok Selatan	6,30	5,54	5,85
11	Kab.Dharmasraya	3,51	3,69	3,94
12	Kab.Pasaman Barat	3,79	3,99	3,37
13	Kota Padang	14,00	9,44	9,18
14	Kota Solok	4,72	5,88	5,97
15	Kota Sawahlunto	7,18	6,19	5,75
16	Kota Padang Panjang	6,33	5,43	5,28
17	Kota Bukittinggi	6,04	6,94	7,15
18	Kota Payakumbuh	7,07	3,45	3,78
19	Kota Pariaman	6,61	5,97	5,72
Sumatera Barat		6,89	5,58	5,55

Catatan : Angka TPT tahun 2016 untuk Kabupaten/Kota tidak ada karena sampel Survei Sakernas Tahun 2016 tidak mencukupi untuk estimasi Kabupaten/Kota

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

- 7. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)**

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 7.1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumatera Barat Tahun 2016 -2018

No.	Jenjang Pendidikan	APM (%)			APK (%)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SD/MI/Sederajat	98,23	98,64	98,66	110,39	110,46	110,99
2.	SMP/MTs/Sederajat	76,19	76,47	77,08	91,05	90,40	90,92
3.	SMA/SMK/MA/Sederajat	67,12	67,30	67,48	84,70	88,39	83,97

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Misal :

APM SD = Jumlah murid SD atau sederajat usia 7-12 Tahun/Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 persen

APK SD = Jumlah murid SD atau sederajat/Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 persen

APS 7-12 Tahun = Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang masih bersekolah/Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun x 100 persen

Tabel 7.2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	APM (%)			APK (%)		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Kep.Mentawai	99,48	60,53	40,18	127,06	73,07	70,01
2	Kab.Pesisir Selatan	99,66	78,08	73,68	108,39	85,88	95,68
3	Kab.Solok	99,20	78,24	56,34	113,49	93,49	67,22
4	Kab.Sijunjung	100,00	75,12	59,16	109,64	92,37	69,93
5	Kab.Tanah Datar	100,00	76,22	68,54	114,90	97,64	77,27
6	Kab.Padang Pariaman	99,49	71,83	71,78	109,68	81,50	101,60
7	Kab.Agam	97,71	78,77	67,48	108,52	96,38	82,83
8	Kab.Lima Puluh Kota	98,97	75,69	74,55	114,05	77,17	87,57
9	Kab.Pasaman	99,40	72,45	53,96	116,71	88,22	68,51

bersambung...

Lanjutan Tabel 7.2

No.	Kabupaten/Kota	APM (%)			APK (%)		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Kab.Solok Selatan	100,00	74,36	64,54	117,50	84,02	73,32
11	Kab.Dharmasraya	99,31	77,17	55,55	112,06	90,62	61,10
12	Kab.Pasaman Barat	98,45	80,88	63,33	109,98	99,17	70,55
13	Kota Padang	95,60	82,32	75,77	104,05	99,64	101,23
14	Kota Solok	99,09	74,28	69,64	109,30	79,65	88,52
15	Kota Sawahlunto	100,00	83,73	71,56	111,33	96,68	88,85
16	Kota Padang Panjang	98,92	78,45	73,81	112,84	92,45	98,66
17	Kota Bukittinggi	98,77	80,79	77,66	110,47	91,16	87,19
18	Kota Payakumbuh	100,00	73,41	70,52	113,58	87,26	78,89
19	Kota Pariaman	99,72	69,36	63,48	122,67	83,23	92,69
Sumatera Barat		98,66	77,08	67,48	110,99	90,92	83,97

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Tabel 7.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	APS (%)		
		Umur 7-12 th	Umur 13-15 th	Umur 16-18 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab.Kep.Mentawai	99,48	97,81	72,15
2	Kab.Pesisir Selatan	99,66	96,66	81,32
3	Kab.Solok	99,20	95,88	81,26
4	Kab.Sijunjung	100,00	90,48	71,20
5	Kab.Tanah Datar	100,00	95,19	92,55
6	Kab.Padang Pariaman	99,49	98,52	85,27
7	Kab.Agam	99,68	95,53	85,82
8	Kab.Lima Puluh Kota	98,97	96,31	74,71
9	Kab.Pasaman	99,40	95,95	75,09

bersambung...

Lanjutan Tabel 7.3

No.	Kabupaten/Kota	APS (%)		
		Umur 7-12 th	Umur 13-15 th	Umur 16-18 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kab.Solok Selatan	100,00	97,91	75,50
11	Kab.Dharmasraya	99,31	96,65	69,53
12	Kab.Pasaman Barat	99,52	96,60	77,71
13	Kota Padang	99,43	96,68	93,69
14	Kota Solok	99,09	96,16	85,91
15	Kota Sawahlunto	100,00	98,90	83,02
16	Kota Padang Panjang	98,92	97,25	94,67
17	Kota Bukittinggi	98,77	98,24	86,33
18	Kota Payakumbuh	100,00	96,86	83,04
19	Kota Pariaman	99,72	97,42	87,48
Sumatera Barat		99,51	96,37	83,08

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

8. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Indikator

Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Umur panjang dan hidup sehat = UHH

Pengetahuan = Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

Standard hidup layak = Pengeluaran perkapita disesuaikan

**Tabel 8.1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sumatera Barat 2016-2018**

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	68,73	68,78	69,01
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)/EYS	13,79	13,94	13,95
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25 th+)/EYS	8,59	8,72	8,76
4	Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan	10 126,00 (ribu Rp)	10 306,00 (ribu Rp)	10 638,00 (ribu Rp)
IPM		70,73	71,24	71,73

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Umur Harapan Hidup Saat Lahir - UHH (*Life Expectancy*)

Umur Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

**Tabel 8.2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	WILAYAH	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sumatera Barat	69,01	13,95	8,76	10 638,00	71,73
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	64,49	12,39	6,95	6 211,00	60,28
2.	Kab. Pesisir Selatan	70,45	13,30	8,14	9 089,00	69,40
3.	Kab. Solok	67,95	13,02	7,84	10 035,00	68,60
4.	Kab. Sijunjung	65,69	12,35	7,77	10 277,00	66,97
5.	Kab. Tanah Datar	69,38	13,88	8,44	10 417,00	71,25
6.	Kab. Padang Pariaman	68,23	13,57	7,50	10 919,00	69,71
7.	Kab. Agam	71,83	13,85	8,69	9 489,00	71,70
8.	Kab. Lima Puluh Kota	69,47	13,27	7,97	9 500,00	69,17
9.	Kab. Pasaman	66,82	12,78	7,66	8 238,00	65,60

bersambung...

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Lanjutan Tabel 8.2.

No.	WILAYAH	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Kab. Solok Selatan	67,21	12,69	8,15	10 199,00	68,45
11.	Kab. Dharmasraya	70,73	12,41	8,25	11 189,00	70,86
12.	Kab. Pasaman Barat	67,37	13,22	7,86	8 979,00	67,43
13.	Kota Padang	73,35	16,50	11,33	14 312,00	82,25
14.	Kota Solok	73,14	14,30	11,01	11 968,00	77,89
15.	Kota Sawah Lunto	69,59	13,15	9,94	9 765,00	71,72
16.	Kota Padang Panjang	72,58	15,04	11,44	10 440,00	77,30
17.	Kota Bukittinggi	73,91	14,95	11,31	13 035,00	80,11
18.	Kota Payakumbuh	73,33	14,24	10,46	13 114,00	78,23
19.	Kota Pariaman	69,87	14,52	10,36	12 611,00	76,26

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

<https://sumbar.biz>

9. INDEKS KEBAHAGIAAN

Indeks Kebahagiaan

Tujuan : Untuk mendapatkan informasi rinci tentang tingkat kebahagiaan yang diukur dengan berbagai variabel objektif dan subjektif yang relevan.

Sumber Data : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Cakupan : Pelaksanaan SPTK 2017 mencakup 72.317 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi, 487 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk estimasi level nasional dan provinsi. Untuk Provinsi Sumatera Barat jumlah sampel 2550 rumah tangga yang tersebar di 19 kabupaten/kota

Kebahagiaan merupakan konsep berupa hasil evaluasi kehidupan yang menggambarkan kondisi kehidupan. Kebahagiaan mencakup 3 dimensi, yakni Kepuasan Hidup, Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia)

Tabel 9.1. Indeks Kebahagiaan Menurut Karakteristik di Sumatera Barat Tahun 2017

Karakteristik Demografi dan Ekonomi	Indeks Kebahagiaan	Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (<i>Affect</i>)	Indeks Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>)
		Total	Sub Dimensi Personal	Sub Dimensi Sosial		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	74,55	74,31	70,92	77,71	71,82	77,30
Perdesaan	70,70	70,60	63,85	77,34	68,88	72,47
Jenis Kelamin						
Laki - Laki	72,92	71,98	66,52	77,44	70,96	75,68
Perempuan	72,20	72,41	67,28	77,53	69,84	74,15
Status Perkawinan						
Belum Menikah	71,37	69,10	66,91	71,30	66,02	78,61
Menikah	73,08	72,86	67,72	78,00	71,02	75,18
Cerai Hidup	68,23	68,33	61,34	75,31	63,91	72,09
Cerai Mati	70,72	71,31	65,50	77,11	69,19	71,53

Lanjutan Tabel 9.3.

Karakteristik Demografi dan Ekonomi	Indeks Kebahagiaan	Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (<i>Affect</i>)	Indeks Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>)
		Total	Sub Dimensi Personal	Sub Dimensi Sosial		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	71,22	70,50	67,05	73,94	66,71	76,10
25 - 40 Tahun	72,71	72,54	67,90	77,18	69,48	75,85
41 - 64 Tahun	72,50	72,11	66,49	77,74	70,88	74,39
≥ 65 Tahun	71,71	72,80	67,26	78,34	70,03	72,13
Kedudukan Dalam Rumah Tangga						
Kepala Rumah Tangga	71,82	71,33	65,81	76,85	69,54	74,40
Pasangan Kepala Rumah Tangga	73,10	73,28	68,35	78,21	70,92	74,91

Sumber : Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), 2017

10. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender dan lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 10.1. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	IPG
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Kep. Mentawai	89,45
2	Kab. Pesisir Selatan	94,62
3	Kab. Solok	96,20
4	Kab. Sijunjung	93,21
5	Kab. Tanah Datar	97,58
6	Kab. Padang Pariaman	93,07
7	Kab. Agam	96,92
8	Kab. Lima Puluh Kota	94,93
9	Kab. Pasaman	92,61
10	Kab. Solok Selatan	94,92
11	Kab. Dharmasraya	88,26
12	Kab. Pasaman Barat	89,59

bersambung...

Lanjutan Tabel 10.1.

No.	Kabupaten/Kota	IPG
(1)	(2)	(3)
13	Kota Padang	93,77
14	Kota Solok	97,24
15	Kota Sawahlunto	95,68
16	Kota Padang Panjang	97,77
17	Kota Bukittinggi	98,80
18	Kota Payakumbuh	98,54
19	Kota Pariaman	98,61
	Sumatera Barat	94,17

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Tabel 10.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan Diparlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Kep. Mentawai	0,00	41,07	30,84	46,90
2	Kab. Pesisir Selatan	4,44	63,48	34,05	53,46
3	Kab. Solok	8,57	59,66	39,08	62,16
4	Kab. Sijunjung	10,00	61,50	28,16	56,84
5	Kab. Tanah Datar	8,57	59,15	33,42	58,41
6	Kab. Padang Pariaman	5,00	51,55	31,10	54,48
7	Kab. Agam	2,22	61,17	38,70	54,16
8	Kab. Lima Puluh Kota	8,57	75,08	28,35	46,81
9	Kab. Pasaman	8,57	55,10	38,33	63,78
10	Kab. Solok Selatan	0,00	49,68	36,46	51,17
11	Kab. Dharmasraya	4,00	57,19	26,76	48,91
12	Kab. Pasaman Barat	2,50	57,33	36,36	54,42

bersambung...

Lanjutan Tabel 10.2.

No.	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Kota Padang	15,56	53,25	34,51	69,01
14	Kota Solok	5,00	62,44	36,19	56,20
15	Kota Sawahlunto	20,00	55,09	27,90	65,86
16	Kota Padang Panjang	20,00	59,75	46,52	76,10
17	Kota Bukittinggi	8,00	58,02	37,29	62,11
18	Kota Payakumbuh	8,00	58,66	38,13	61,99
19	Kota Pariaman	5,00	63,90	30,91	51,34
	Sumatera Barat	10,77	57,64	37,40	65,01

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2018

11. INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tabel 11.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2016

Indeks	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Indeks Pembangunan TIK	3,86	4,24

Sumber : BPS Provinsi Sumatera

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.

IP-TIK disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar pembangunan TIK suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum, sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah masih belum optimum.

**12. INDEKS DEMOKRSI
INDONESIA (IDI)
SUMATERA BARAT**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,82. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Tabel 12.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat, 2009-2017

Indeks	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IDI Sumatera Barat	60,29	63,04	65,02	60,82	54,11	63,99	67,46	54,41	69,50

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

<https://sumbar.biz>

**13. INDEKS PEMBANGUNAN DESA
(IPD)**

Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu.

IPD mengklasifikasikan desa menjadi 3 status, yaitu :

- 1). Desa Tertinggal
- 2). Desa Berkembang
- 3). Desa Mandiri

Tabel 13.1. Persentase Desa dan Jumlah Desa Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Sumatera Barat, 2014 dan 2018

Indeks	2014		2018	
	Persentase	Jumlah Desa	Persentase	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Desa Tertinggal	6,32	56	3,16	28
Desa Berkembang	84,09	745	76,41	677
Desa Mandiri	9,59	85	20,43	181

Sumber : Potensi Desa 2014 dan 2018

Tabel 13.2. Kemandirian Desa Dalam Indeks Pembangunan Desa Provinsi Sumatera Barat 2014-2018

Kemandirian Desa	2014	2018
(1)	(2)	(3)
Pelayanan Dasar	69,36	68,26
Kondisi Infrastruktur	46,51	54,36
Transportasi	77,70	82,88
Pelayanan Umum	58,41	60,50
Pemerintah Desa	70,11	75,71

**Sumber : Tahun 2014 , Indeks Pembangunan Desa Bappenas 2014
Tahun 2018 , Potensi Desa 2018**

**14. UPAH MINIMUM PROVINSI
(UMP)**

Tabel 14.1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat, 2010-2018

Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dasar
(1)	(2)	(3)
2010	940 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-505-2009 Tanggal 31 Desember 2009”
2011	1 055 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-846-2010 Tanggal 8 November 2010”
2012	1 150 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 840-479-2011 Tanggal 26 Oktober 2011”
2013	1 350 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-781-2012 Tanggal 6 November 2012”
2014	1 490 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-846-2013 Tanggal 29 Oktober 2013”
2015	1 615 000,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-802-2014 Tanggal 27 Oktober 2014”

Bersambung

Lanjutan Tabel 14.1

Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Dasar
(1)	(2)	(3)
2016	1 800 725,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-777-2015 Tanggal 30 Oktober 2015”
2017	1 949 284,81	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-1178-2016 Tanggal 28 Oktober 2016”
2018	2 119 067,00	“Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 562-8798-2017 Tanggal 31 Oktober 2017”

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

<https://sumbar.biz>

15. PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA

Produksi Padi

- Padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang
- Bentuk produksi padi adalah gabah kering giling
- Produksi padi adalah hasil kali dari luas panen dan produktivitas.
- Sumber data yang utama digunakan dalam pengumpulan data tanaman pangan di Indonesia adalah melalui kegiatan Survei Pertanian (SP) and Survei Ubinan.

Produksi Palawija

- Palawija terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 15.1. Jumlah Produksi Padi menurut Kab./kota di Sumatera Barat(ton), 2015 - 2018

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)			
		2015 *	2016 *	2017*	2018 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab.Kep.Mentawai	3 036,00	2 477,00	5 189,00	1 976,00
2	Kab.Pesisir Selatan	317 573,00	274 119,00	376 972,00	187 009,00
3	Kab.Solok	307 999,00	330 082,00	366 355,00	150 963,00
4	Kab.Sijunjung	88 338,00	90 209,00	72 583,00	59 521,00
5	Kab.Tanah Datar	245 196,00	235 636,00	298 959,00	183 372,00
6	Kab.Padang Pariaman	278 127,00	287 046,00	321 376,00	146 016,00
7	Kab.Agam	326 891,00	372 414,00	405 578,00	178 970,00
8	Kab.Lima Puluh Kota	227 184,00	226 170,00	210 452,00	164 657,00
9	Kab.Pasaman	216 766,00	191 282,00	232 471,00	161 977,00

bersambung...

Lanjutan Tabel 15.1

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)			
		2015 *	2016 *	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kab.Solok Selatan	136 363,00	118 530,00	128 013,00	61 593,00
11	Kab.Dharmasraya	57 356,00	59 282,00	58 259,00	31 773,00
12	Kab.Pasaman Barat	147 528,00	121 217,00	136 385,00	66 136,00
13	Kota Padang	88 753,00	82 620,00	84 201,00	52 033,00
14	Kota Solok	11 756,00	13 290,00	14 273,00	10 964,00
15	Kota Sawahlunto	16 657,00	15 055,00	13 641,00	6 459,00
16	Kota Padang Panjang	9 481,00	10 347,00	11 609,00	3 786,00
17	Kota Bukittinggi	5 096,00	5 227,00	5 204,00	5 360,00
18	Kota Payakumbuh	34 416,00	37 402,00	41 150,00	21 863,00
19	Kota Pariaman	32 093,00	31 047,00	41 834,00	14 909,00
Sumatera Barat		2 550 609,00	2 503 452,00	2810 425,00	1 509 337,00

Catatan : Data Tahun 2018, Data real panen.

Sumber : * : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

** : Data bersumber Kerangka Sampel Area (KSA), BPS

Tabel 15.2. Jumlah Produksi Palawija menurut Kab/kota di Sumatera Barat(ton), 2018

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Palawija (ton)					
		Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1.	Kab.Kep.Mentawai	25	-	-	-	1 987	455
2.	Kab.Pesisir Selatan	137 273	18	324	20	11 255	79
3.	Kab.Solok	3 919	2	197	-	6 231	41 032
4.	Kab.Sijunjung	2 973	355	41	10	1 512	-
5.	Kab.Tanah Datar	40 023	591	713	15	24 458	36 819
6.	Kab.Padang Pariaman	60 524	106	104	1	7 827	-
7.	Kab.Agam	119 412	312	1470	46	50 822	33 466
8.	Kab.Lima Puluh Kota	40 211	38	223	-	46 884	3 590
9.	Kab.Pasaman	66 040	676	174	29	2 184	947

bersambung...

Lanjutan Tabel 15.2

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (ton)					
		Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Kab.Solok Selatan	67 899	24	617	12	4 060	3 860
11	Kab.Dharmasraya	15 930	84	182	3	1 832	252
12	Kab.Pasaman Barat	367 865	41	623	175	8 819	13 610
13	Kota Padang	514	14	18	-	1 111	230
14	Kota Solok	419	4	2	-	744	58
15	Kota Sawahlunto	241	2	1	1	7 441	-
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	253
17	Kota Bukittinggi	61	-	-	-	572	818
18	Kota Payakumbuh	1 987	-	-	-	6244	-
19	Kota Pariaman	248	-	-	-	386	-
Sumatera Barat		925 564	2 267	4 689	312	184 369	135 469

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 15.3. Luas Panen, Produksi GKG, Produksi Beras dan Konsumsi Beras dan Neraca 2018 (Metode KSA)

No.	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton GKG)	Produksi Beras (Ton Beras)	Konsumsi Beras (Ton Beras)	Neraca (Produksi Beras - Konsumsi Beras)
1.	Kab.Kep.Mentawai	788	1 976	1 137	11089	-9 952
2.	Kab.Pesisir Selatan	37 128	187 009	107 726	56 527	51 199
3.	Kab.Solok	29 761	150 963	86 960	45 530	41 430
4.	Kab.Sijunjung	14 894	59 521	34 287	28 685	5 602
5.	Kab.Tanah Datar	34 739	183 372	105 628	42 622	63 006
6.	Kab.Padang Pariaman	31 656	146 016	84 111	50 700	33 411
7.	Kab.Agam	34 585	178 970	103 095	59 860	43 235
8.	Kab.Lima Puluh Kota	38 179	164 657	94 849	46 565	48 284
9.	Kab.Pasaman	37 947	161 977	93 308	34 167	59 141

bersambung...

Lanjutan Tabel 15.3

No.	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton GKG)	Produksi Beras (Ton Beras)	Konsumsi Beras (Ton Beras)	Neraca
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Kab.Solok Selatan	14 475	61 593	35 480	20 662	14 818
11.	Kab. Dharmasraya	7 347	31 773	18 303	29 637	-11 334
12.	Kab. Pasaman Barat	13 320	66 136	38 098	53 445	-15 347
13.	Kota Padang	11 123	52 033	29 971	115 221	-85 250
14.	Kota Solok	2 101	10 964	6 313	8 562	-2 249
15.	Kota Sawahlunto	1 353	6 459	3 720	7 594	-3 874
16.	Kota Padang Panjang	805	3 786	2 181	6 499	-4 318
17.	Kota Bukittinggi	913	5 360	3 088	15 802	-12 714
18.	Kota Payakumbuh	4 645	21 863	12 593	16 401	-3 808
19.	Kota Pariaman	3 006	14 909	8 588	10 752	-2 164
Sumatera Barat		318 765	1 509 337	869 436	660 320	209 116

16. INFLASI

Inflasi:

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga konsumen (IHK):

Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Tabel 16.1. Inflasi Padang, Bukittinggi, Gabungan Dua Kota, dan Indonesia per Bulan 2018

WILAYAH	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Padang	0,43	-0,09	0,31	0,01	0,46	0,39	0,62	-0,40	-0,35	0,80	0,19	0,16
Bukittinggi	0,75	-0,22	0,28	0,12	-0,39	0,20	0,09	-0,13	0,10	0,92	0,83	0,41
Gabungan dua Kota	0,46	-0,10	0,31	0,02	0,36	0,38	0,56	-0,37	-0,30	0,81	0,27	0,18
Indonesia	0,62	0,17	0,20	0,10	0,21	0,59	0,28	-0,05	-0,18	0,28	0,27	0,62

Sumber : Berita Resmi Statistik

- Beberapa komoditas yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa.
- Untuk beberapa komoditas bahan makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali, hari Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga.
- Untuk komoditas bahan makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis).
- Data harga untuk barang-barang tahan lama dikumpulkan secara bulanan pada hari ke-5 sampai hari ke-15.
- Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Upah baby sitter dan pembantu rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
- Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

Tabel 16.2. Inflasi Padang, Bukittinggi, Gabungan Dua Kota, dan Indonesia 2014-2018

Tahun	Kota Padang	Kota Bukittinggi	Gabungan Dua Kota	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	11,90	9,24	11,58	8,36
2015	0,85	2,79	1,08	3,35
2016	5,02	3,93	4,89	3,02
2017	2,11	1,37	2,02	3,61
2018	2,55	2,99	2,60	3,13

Catatan : Pendataan Survei Harga Konsumen (SHK) Kota Bukittinggi baru dimulai tahun 2014

Sumber : Berita Resmi Statistik

<https://sumbar.bk>

17. PARIWISATA

PARIWISATA

- **Tingkat Penghunian Kamar Hotel**

adalah banyaknya malam kamar yang terjual dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikalikan 100%.

- **Tingkat Penghunian Tempat Tidur**

adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya malam tempat tidur yang tersedia dikalikan 100%.

- **Rata-rata Lama Tamu Menginap**

adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap.

Tabel 17.1. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2018 per Bulan

Bulan	TPK (%)		RLMT (hari)		Wisman (orang)
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jan	47,34	28,55	1,48	1,45	3 246
Feb	53,51	31,92	1,56	1,48	4 459
Mar	53,47	29,55	1,54	1,31	5 057
April	60,30	30,98	1,87	1,43	4 286
Mei	49,96	30,37	1,70	1,58	3 002
Jun	48,57	33,18	1,58	1,18	4 549

bersambung...

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu

1. **Wisatawan** (*tourist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
- b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

2. **Pelancong** (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Lanjutan Tabel 17.1.

Bulan	TPK (%)		RLMT (hari)		Wisman (orang)
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Juli	58,09	35,13	1,36	1,37	5 100
Agus	59,45	30,65	1,54	1,44	5 602
Sep	56,81	28,51	1,44	1,42	5 094
Okt	65,06	31,37	1,50	1,44	4 055
Nov	65,35	32,24	1,55	1,39	5 118
Des	58,59	34,39	1,36	1,29	4 801

Sumber : Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel, 2018

1. Usaha Akomodasi

adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

2. Hotel berbintang

adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

3. Hotel nonbintang/Melati

adalah usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

4. Pondok Wisata (*Homestay*)

adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

5. Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan.

6. Villa

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.

7. Jasa akomodasi jangka pendek lainnya

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk salah satu di atas, misalnya bungalow, cottage, dan lain-lain.

Tabel 17.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Rata-rata Lama Tamu Menginap, dan Jumlah Wisman Sumbar 2012-2018

Tahun	TPK (%)		RLMT (hari)		Wisman (orang)
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	49,00	35,66	1,40	1,26	36 623
2013	50,22	36,81	1,50	1,28	48 710
2014	48,53	37,18	1,65	1,49	56 111
2015	53,11	36,88	1,56	1,34	48 755
2016	53,27	32,92	1,40	1,18	49 686
2017	54,80	34,29	1,53	1,26	56 876*
2018	55,58	31,31	1,47	1,39	54 369

Catatan : * : Data Diperbaiki

Sumber : Berita Resmi Statistik

<https://sumbar.biz>

18. EKSPOR IMPOR

Ekspor Impor Perdagangan luar negeri

terdiri dari ekspor dan impor barang-barang

Sumber Data

Data utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.

Metode Pengumpulan

Data diperoleh dari hasil kompilasi dan survei.

Tabel 18.1. Volume dan Nilai Ekspor Impor 2013-2018

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (ribu ton)	Nilai (juta US \$)	Volume (ribu ton)	Nilai (juta US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	4 596	2 209	1 331	1 035
2014	3 994	2 106	1 444	1 035
2015	3 735	1 748	1 483	633
2016	3 643	1 708	1 016	345
2017	4 723	2 046	1 025	446
2018	4 907	1 595	1 138	546

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Perdagangan luar negeri

terdiri dari ekspor dan impor barang-barang

1. Cakupan komoditas

Semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk dibawah ini:

- a. Pakaian dan perhiasan dari para penumpang dan awak alat angkut.
- b. Barang-barang yang diekspor/diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut.
- c. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekshebisi atau pameran.
- d. Peti Kemas yang dimaksudkan untuk diisi kembali.
- e. Uang, surat-surat berharga dan barang finansial lainnya.
- f. Barang-barang contoh.

2. Sistem Perdagangan

- a. Statistik ekspor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia.
- b. Statistik Impor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum sejak tahun 2008. Sebelum tahun 2008 menggunakan Sistem Perdagangan Khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai Luar Negeri.

Tabel 18.2. Volume dan Nilai Ekspor Impor per Bulan Tahun 2018

Bulan	Ekspor		Impor	
	Volume (ribu ton)	Nilai (juta US \$)	Volume (ribu ton)	Nilai (juta US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	327,86	140,36	147,99	62,83
Februari	447,94	144,92	100,61	33,34
Maret	379,57	126,33	83,73	29,14
April	413,40	131,02	83,07	37,80
Mei	437,12	122,22	92,47	36,34
Juni	454,36	108,19	88,02	49,70

bersambung...

3. Penilaian

- a. Ekspor mengacu pada nilai *Free On Board* (FOB).
- b. Impor mengacu pada nilai *Cost Insurance and Freight* (CIF).
- c. Keduanya dinyatakan dalam Dollar Amerika (USD)

4. Pengukuran Kuantitas

Semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat netto dalam satuan kilogram.

5. Rekan Negara

- a. Negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.
- b. Negara asal adalah negara dimana barang-barang tersebut diproduksi, setelah diverifikasi oleh Kantor Bea Cukai, sesuai dengan peraturan.

Lanjutan Tabel 18.2.

Bulan	Ekspor		Impor	
	Volume (ribu ton)	Nilai (juta US \$)	Volume (ribu ton)	Nilai (juta US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Juli	449,01	153,46	74,18	47,36
Agustus	456,85	146,76	150,81	60,73
September	411,24	141,90	41,82	29,51
Oktober	369,46	135,97	112,32	94,05
November	419,24	130,51	50,78	30,11
Desember	340,79	113,36	111,76	35,42

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

<https://sumbar.biz>

19. TRANSPORTASI

TRANSPORTASI

Kegiatan-kegiatan ini mencakup 3 jenis transportasi, yaitu transportasi darat, laut dan udara. Statistik Angkutan Darat berisi informasi statistik semua kendaraan bermotor di Indonesia kecuali kendaraan militer dan diplomatik; Informasi panjang jalan didapat dari kantor pemerintah pusat atau daerah; dan transportasi kereta api mengumpulkan informasi penumpang dan barang di Jawa, Madura dan Sumatera.

Statistik Angkutan Laut memberikan informasi statistik tentang pelabuhan seperti cargo, jumlah keberangkatan dan kedatangan serta trafik kapal.

Statistik Angkutan Udara mencakup jadwal penerbangan dan baik domestik dan Internasional; dan statistik pelabuhan udara baik komersial dan non komersial seluruh Indonesia.

Sumber Data

Statistik Transportasi Darat didasarkan pada data sekunder dari Instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, Kepolisian, Kantor Pemerintah Daerah, PTKA, Perusahaan angkutan penyebrangan.

Statistik Angkutan Laut didapat dari semua pelabuhan laut seluruh Indonesia baik komersial dan non komersial.

Statistik Angkutan Udara terdiri dari data primer yang dikumpulkan oleh BPS melalui survei dan data sekunder yang didapat dari Direktorat Jenderal Transportasi Udara.

Tabel 19.1. Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara 2013-2018

Tahun	Angkutan Laut (000 ton)	Angkutan Udara	
		Domestik (000 orang)	Internasional (000 orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	4 740,05	1 268,88	92,13
2014	4 684,51	1 317,52	95,95
2015	4 289,21	1 439,51	133,53
2016	3 710,42	1 741,39	105,90
2017	4 307,80	1 844,49	115,65
2018	3 157,86	1 896,53	143,42

Sumber : Berita Resmi Statistik

Angkutan Laut

Bongkar/Impor Barang

adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Muat/Ekspor Barang

adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri.

Pelabuhan

adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan Umum

adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kebiatan angkutan laut.

Kantor Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor Pelabuhan (KANPEL)

adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel 19.2. Volume Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara per Bulan Tahun 2018

Bulan	Angkutan Laut (000 ton)	Angkutan Udara	
		Domestik (000 orang)	Internasional (000 orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jan	270,11	165,10	10,40
Feb	312,33	148,64	11,30
Mar	172,63	153,36	13,61
April	241,00	162,06	10,66
Mei	268,02	134,08	8,36
Juni	229,01	174,93	10,49

bersambung...

Pengumpulan Data

Statistik Angkutan Laut

dikumpulkan dengan sensus dari pelabuhan laut komersial dan non komersial seluruh Indonesia.

Statistik Angkutan Udara

Pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran tentang aktifitas angkutan udara antar bandar udara secara nasional dilakukan melalui beberapa cara. Untuk lalu lintas angkutan udara berupa asal tujuan, pergerakan pesawat udara, penumpang, bagasi, barang dan pos/paket dikumpulkan dari bandar udara baik yang dikelola oleh PT. (Persero) Angkasa Pura maupun Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di daerah yang bersangkutan. Data lalu lintas angkutan udara yang dikumpulkan ini merupakan rekapitulasi terhadap aktivitas penerbangan masing-masing bandar udara setiap bulan. Sedangkan data registrasi pesawat dikumpulkan dari Direktorat Penerbangan Sipil serta data produksi perusahaan penerbangan berjadwal diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan kemudian dilengkapi dengan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Lanjutan Tabel 19.2.

Bulan	Angkutan Laut (000 ton)	Angkutan Udara	
		Domestik (000 orang)	Internasional (000 orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
Juli	223,17	194,55	16,75
Agustus	307,32	165,51	10,78
September	306,41	161,81	10,39
Oktober	310,71	153,66	11,22
November	249,45	141,45	13,07
Desember	267,71	141,39	16,41

Sumber : Berita Resmi Statistik

<https://sumbar.biz>

**20. NILAI TUKAR PETANI
(NTP) DAN NILAI TUKAR
USAHA PETANI (NTUP)**

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani

NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

Arti Angka NTP :

$NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

$NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

$NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 20.1. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2014-2018

TAHUN	Sumatera Barat		Indonesia	
	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP Nilai Tukar Usaha Perta- nian)	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Perta- nian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	100,61	106,34	102,03	106,05
2015	97,74	104,49	101,59	107,44
2016	97,67	107,13	101,65	109,93
2017	96,97	107,97	101,28	110,23
2018	95,31	108,38	102,46	111,83

Sumber : Berita Resmi Statistik

NILAI TUKAR USAHA PETANI (NTUP)

Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM); 2. Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.

Kegunaan : Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani untuk produksi pertaniannya (Ibup) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTUP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk produksi dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTUP menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitabilitas).

Tabel 20.2. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Sumatera Barat dan Indonesia per Bulan Tahun 2018

Bulan	Sumatera Barat		Indonesia	
	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	95,81	108,69	102,92	112,67
Februari	95,57	108,33	102,33	112,11
Maret	94,83	108,16	101,94	111,58
April	94,71	108,37	101,61	111,03
Mei	94,81	107,97	101,99	111,38
Juni	94,82	107,32	102,04	111,51

bersambung...

Interpretasi :

1. $NTUP > 100$: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada
2. $NTUP = 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani untuk produksinya terhadap tahun dasar;
3. $NTUP < 100$: petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Lanjutan Tabel 20.2

Bulan	Sumatera Barat		Indonesia	
	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Per- tanian)	NTP (Nilai Tukar Petani)	NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Juli	94,07	107,26	101,66	111,55
Agustus	95,13	108,23	102,56	112,08
September	96,37	108,92	103,17	112,05
Oktober	96,53	109,61	103,02	111,91
November	95,85	109,23	103,12	111,92
Desember	95,16	108,52	103,16	112,21

Sumber : Berita Resmi Statistik

<https://sumbar.biz>

21. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu yang sama terhadap kota acuan.

Tujuan : Menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasian.

Sumber Data: Data harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat serta diagram timbang (BoQ) kelompok jenis bangunan masing-masing kabupaten/Kota.

Tabel 21.1. Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015- 2018

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)			
		2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab.Kep.Mentawai	162,90	148,28	138,18	126,21
2.	Kab.Pesisir Selatan	99,21	94,50	91,23	97,32
3.	Kab.Solok	94,71	93,65	95,46	101,11
4.	Kab.Sijunjung	92,82	94,99	92,20	97,67
5.	Kab.Tanah Datar	90,43	95,27	90,65	101,69
6.	Kab.Padang Pariaman	91,18	93,92	93,61	95,41
7.	Kab.Agam	91,44	97,63	95,13	96,61
8.	Kab.Lima Puluh Kota	87,74	97,33	97,86	97,50
9.	Kab.Pasaman	88,22	89,09	86,30	94,03

Bersambung.....

Lanjutan Tabel 21.1.

No.	WILAYAH	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)			
		2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Kab. Solok Selatan	101,97	96,61	94,34	99,07
11.	Kab. Dharmasraya	91,44	96,92	93,20	99,50
12.	Kab. Pasaman Barat	101,29	104,34	94,70	95,87
13.	Kota Padang	97,27	97,90	92,73	94,76
14.	Kota Solok	101,51	97,75	91,27	97,96
15.	Kota Sawah Lunto	95,42	96,62	95,37	97,34
16.	Kota Padang Panjang	98,01	94,28	91,96	100,56
17.	Kota Bukittinggi	94,04	94,93	95,55	98,27
18.	Kota Payakumbuh	88,33	89,76	92,54	96,19
19.	Kota Pariaman	96,78	96,83	97,58	99,51
Sumatera Barat		103,01	103,69	95,33	99,10

Sumber : Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan, BPS

22. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu

- **Produk Domestik Regional Bruto Perkapita** adalah Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.
- **Harga berlaku** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
- **Harga konstan** adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Tabel 22.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita Sumbar dan Indonesia Tahun 2010-2018

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		PDRB Perkapita (Juta Rp)	
	Sumbar	Indonesia	Sumbar	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	5,94	6,22	17,93	23,97
2011	6,34	6,17	20,06	30,66
2012	6,31	6,03	26,30	35,11
2013	6,08	5,56	29,00	38,28
2014	5,88	5,01	32,14	41,92
2015	5,53	4,88	34,63	45,14
2016	5,27	5,03	37,28*	47,96
2017	5,29	5,07	40,19*	51,89
2018	5,14	5,17	42,83	56,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

- **Pengeluaran konsumsi rumah tangga** mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.
- **Pengeluaran konsumsi pemerintah** mencakup pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, penyusutan maupun belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran rutin lainnya), baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- **Pembentukan Modal Tetap Bruto** mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk disini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup di sini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.
- **Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto** diperoleh dari perhitungan PDRB atas harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

**Tabel 22.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumbar, dan Kab/
Kota se-Sumatera Barat Tahun 2015-2017**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
	Indonesia	4,88	5,02	5,07
	Sumatera Barat	5,52	5,26	5,29
1	Kab. Kep. Mentawai	5,15	5,01	5,13
2	Kab. Pesisir Selatan	5,73	5,30	5,42
3	Kab. Solok	5,43	5,30	5,33
4	Kab. Sijunjung	5,66	5,25	5,27
5	Kab. Tanah Datar	5,31	5,01	5,12
6	Kab. Padang Pariaman	6,13	5,50	5,59
7	Kab. Agam	5,51	5,40	5,43
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,56	5,31	5,34

Lanjutan Tabel 22.2.

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
9.	Kab. Pasaman	5,33	5,06	5,09
10.	Kab. Solok Selatan	5,35	5,11	5,15
11.	Kab. Dharmasraya	5,80	5,39	5,45
12.	Kab. Pasaman Barat	5,70	5,32	5,35
13.	Kota Padang	6,35	6,21	6,23
14.	Kota Solok	5,95	5,75	5,78
15.	Kota Sawahlunto	6,00	5,71	5,75
16.	Kota Padang Panjang	5,91	5,79	5,81
17.	Kota Bukittinggi	6,12	6,04	6,08
18.	Kota Payakumbuh	6,19	6,08	6,12
19.	Kota Pariaman	5,78	5,58	5,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 22.3. Kontribusi PDRB Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha 2015-2018

No.	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,69	24,02	23,55	23,16
2	Pertambangan dan Penggalian	4,82	4,52	4,26	4,26
3	Industri Pengolahan	10,18	10,08	9,71	9,10
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,10	0,11	0,11	0,11
5	Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	9,38	9,27	9,32	9,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,61	14,87	15,05	15,31

bersambung...

Lanjutan Tabel 22.3.

No.	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Transportasi dan Pergudangan	12,23	12,45	12,64	12,66
9	Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,31	1,35	1,37
10	Informasi dan Komunikasi	4,85	4,99	5,28	5,47
11	Jasa Keuangan	3,10	3,17	3,09	3,01
12	Real Estate	2,00	2,00	1,97	1,96
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5,70	5,82	5,85	5,92
15	Jasa Pendidikan	3,67	3,84	4,13	4,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,27	1,33	1,38
17	Jasa Lainnya	1,68	1,77	1,84	1,93

Catatan : * : Data Triwulan III Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Indikator Strategis Provinsi Sumatera Barat 2018

**Tabel 22.4. Kontribusi PDRB Sumbar menurut Pengeluaran
Tahun 2015-2018**

JENIS PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,64	52,84	52,50	53,08
- Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	1,11	1,12	1,05	1,06
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,48	13,27	12,68	12,65
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	30,52	30,35	29,93	29,78
- Perubahan Inventori	0,33	0,26	0,15	0,0
- Ekspor LN	12,50	10,85	12,62	10,60
- Impor LN	5,49	3,02	3,42	4,02
- Net Ekspor Antar Daerah	-6,09	-5,67	-5,50	-3,15
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik

Tabel 22.5. PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 dan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Miliar)	PDRB ADHB Perkapita (Juta)	PDRB ADHK 2000 (Miliar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	4 098 045,72	46,21	2 741 873,53
2	Kab. Pesisir Selatan	12 521 624,66	27,38	8 678 853,24
3	Kab. Solok	11 949 118,73	32,41	8 965 654,44
4	Kab. Sijunjung	7 980 418,97	34,68	6 136 271,18
5	Kab. Tanah Datar	11 620 390,45	33,53	8 783 441,89
6	Kab. Padang Pariaman	19 205 407,50	46,73	12 350 586,95
7	Kab. Agam	18 218 208,89	37,62	13 237 976,19
8	Kab. Lima Puluh Kota	13 772 275,62	36,62	10 123 951,19
9	Kab. Pasaman	8 050 121,63	29,20	5 615 085,80
10	Kab. Solok Selatan	4 990 779,67	30,14	3 612 139,53
11	Kab. Dharmasraya	9 282 389,03	39,42	6 843 996,72
12	Kab. Pasaman Barat	14 067 550,71	32,92	10 383 792,11

bersambung...

Lanjutan Tabel 22.5

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Miliar)	PDRB ADHB Perkapita (Juta)	PDRB ADHK 2000 (Miliar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kota Padang	53 883 254,28	58,13	39 696 142,80
14	Kota Solok	3 547 666,97	51,71	2 581 191,68
15	Kota Sawahlunto	3 235 479,20	52,70	2 517 704,07
16	Kota Padang Panjang	3 028 806,66	57,78	2 313 117,04
17	Kota Bukittinggi	7 453 106,84	58,78	5 483 598,44
18	Kota Payakumbuh	5 760 948,33	43,70	3 997 942,93
19	Kota Pariaman	4 386 767,66	50,64	3 234 534,59
Jumlah		217 052 361,50	40,79	157 297 854,32
Sumatera Barat		214 585 229,26	40,32	155 963 985,42

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

<https://sumbar.biz>

23. SENSUS EKONOMI

2016 (SE-2016) - LISTING

SE2016 secara khusus memotret skala usaha yang diklasifikasikan menjadi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Sebuah usaha atau perusahaan dianggap UMB dengan mempertimbangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), badan usaha, jumlah tenaga kerja, dan kriteria sektoral lainnya serta threshold yang tertuang dalam Undang-undang no 20 Tahun 2008.

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.

Kriteria umum penentuan skala usaha berdasarkan badan hukum adalah seluruh usaha yang berbadan hukum mayoritas dikategorikan sebagai Usaha Menengah dan Besar (UMB) kecuali Kategori Industri yang hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja.

Penentuan skala usaha berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. Usaha Menengah:

kekayaan bersih > 500 juta s/d 10 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau Omset/tahun > 2,5 miliar s/d 50 miliar rupiah.

b. Usaha Besar : diatas usaha menengah.

Kriteria khusus berdasarkan kategori

Industri

- Usaha Menengah : Jumlah Tenaga Kerja 20-99 orang
- Usaha Besar : Jumlah Tenaga Kerja \geq 100 orang

Konstruksi

- Usaha Menengah : kualifikasi M1 & M2
- Usaha Besar : kualifikasi B1 & B1
- Kualifikasi M1, M2, B1 dan B2 mengacu pada Peraturan Nomor 10 Tahun 2014 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Hotel

- UMB merupakan hotel berbintang 1 s.d. 5

Tabel 23.1. Jumlah Usaha/Perusahaan Hasil SE2016 menurut Kategori dan Lokasi Usaha (usaha)

Kategori	Lokasi Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	Usaha selain pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	110	6 397	6 507
C. Industri Pengolahan	22 908	64 485	87 393
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	325	439	764
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	200	899	1.099
F. Konstruksi	741	5 125	5 866
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	116 582	153 199	269 781

bersambung...

Lanjutan Tabel 23.1.

Kategori	Lokasi Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	Usaha selain pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	
H. Pengangkutan dan pergudangan	1 337	24 668	26 005
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	39 786	74 834	114 620
J. Informasi Dan Komunikasi	4 538	9 224	13 762
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	3 276	903	4 179
L. Real Estat	370	11 985	12 355
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3 698	5 701	9 399
P. Pendidikan	13 908	1 924	15 832

Lanjutan Tabel 23.1.

Kategori	Lokasi Usaha		Total Usaha/ Perusahaan
	Usaha pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	Usaha selain pada Bangunan Khusus Tempat Usaha	
(1)	(2)	(3)	(4)
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	2 826	4 855	7 681
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi S. Aktivitas Jasa Lainnya U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	7 114	10 724	17 838
Jumlah	217 719	375 362	593 081

Sumber : SE 2016-Listing

Tabel 23.2. Persentase Jumlah Usaha Hasil SE2016 menurut Kategori

Kategori (1)	Persentase (2)
B. Pertambangan dan penggalian	1,10
C. Industri Pengolahan	14,74
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,13
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,19
F. Konstruksi	0,99
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	45,49
H. Pengangkutan dan pergudangan	4,38
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	19,33
J. Informasi Dan Komunikasi	2,32

bersambung...

Lanjutan Tabel 23.2.

Kategori	Persentase
(1)	(2)
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,70
L. Real Estat	2,08
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	1,58
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	
P. Pendidikan	2,67
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1,30
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	3,01
S. Aktivitas Jasa Lainnya	
U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	
Jumlah	100,00

Sumber : SE 2016-Listing

Tabel 23.3. Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (usaha)

KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	6 418	89	6 507
C. Industri Pengolahan	87 165	228	87 393
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	662	102	764
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1 017	82	1 099
F. Konstruksi	5 462	404	5 866
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	265 645	4 136	269 781
H. Pengangkutan dan pergudangan	25 519	486	26 005

bersambung...

Lanjutan Tabel 23.3.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	114 366	254	114 620
J. Informasi Dan Komunikasi	13 460	302	13 762
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	2 907	1 272	4 179
L. Real Estat	12 252	103	12 355
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	8 906	493	9 399
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya			
P. Pendidikan	15 625	207	15 832

bersambung...

Lanjutan Tabel 23.3.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	7 605	76	7 681
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi S. Aktivitas Jasa Lainnya U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	17 772	66	17 838
Jumlah	584 781	8 300	593 081

Sumber : SE 2016-Listing

Tabel 23.4. Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kategori (orang)

KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	13 957	6 056	20 013
C. Industri Pengolahan	156 146	30 589	186 735
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1 247	4 171	5 418
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1 707	2 298	4 005
F. Konstruksi	53 795	13 681	67 476
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	387 979	34 025	422 004
H. Pengangkutan dan pergudangan	29 527	7 051	36 578

Lanjutan Tabel 23.4.

KATEGORI	UMK	UMB	Total
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	177 110	5 934	183 044
J. Informasi Dan Komunikasi	17 196	3 075	20 271
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15 569	23 450	39 019
L. Real Estat	13 570	807	14 377
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	21 000	4 570	25 570
P. Pendidikan	145 072	14 753	159 825
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	22 651	13 653	36 304
R. Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi S. Aktivitas Jasa Lainnya U. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	27 728	966	28 694
JUMLAH	1 084 254	165 079	1 249 333

Sumber : SE 2016-Listing

Tabel 23.5. Jumlah UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota (usaha)

No.	KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4 681	71	4 752
2	KAB. PESISIR SELATAN	43 076	355	43 431
3	KAB. SOLOK	37 602	364	37 966
4	KAB. SIJUNJUNG	29 105	198	29 303
5	KAB. TANAH DATAR	45 546	345	45 891
6	KAB. PADANG PARIAMAN	43 591	375	43 966
7	KAB. AGAM	56 323	400	56 723
8	KAB. LIMA PULUH KOTA	47 612	304	47 916
9	KAB. PASAMAN	26 077	190	26 267
10	KAB. SOLOK SELATAN	15 936	106	16 042

bersambung...

Lanjutan Tabel 23.5.

No.	KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	KAB. DHARMASRAYA	22 618	310	22 928
12	KAB. PASAMAN BARAT	38 764	446	39 210
13	KOTA PADANG	90 616	3 036	93 652
14	KOTA SOLOK	9 870	240	10 110
15	KOTA SAWAH LUNTO	8 792	101	8 893
16	KOTA PADANG PANJANG	9 260	180	9 440
17	KOTA BUKITTINGGI	22 794	629	23 423
18	KOTA PAYAKUMBUH	19 279	448	19 727
19	KOTA PARIAMAN	13 239	202	13 441
SUMATERA BARAT		584 781	8 300	593 081

Sumber : SE 2016-Listing

Tabel 23.6. Jumlah Tenaga Kerja UMB dan UMK Hasil SE2016 menurut Kab/Kota di Sumatera Barat (orang)

No.	KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	11 726	751	12 477
2	KAB. PESISIR SELATAN	82 354	4 698	87 052
3	KAB. SOLOK	67 244	3 705	70 949
4	KAB. SIJUNJUNG	50 521	3 568	54 089
5	KAB. TANAH DATAR	79 701	3 982	83 683
6	KAB. PADANG PARIAMAN	78 145	8 144	86 289
7	KAB. AGAM	96 615	6 460	103 075
8	KAB. LIMA PULUH KOTA	79 529	2 505	82 034
9	KAB. PASAMAN	48 110	2 770	50 880
10	KAB. SOLOK SELATAN	31 414	4 017	35 431

Lanjutan Tabel 23.7.

No.	KATEGORI	UMK	UMB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	KAB. DHARMASRAYA	42 464	4 828	47 292
12	KAB. PASAMAN BARAT	70 587	6 696	77 283
13	KOTA PADANG	179 677	81 469	261 146
14	KOTA SOLOK	19 844	4 652	24 496
15	KOTA SAWAH LUNTO	15 941	4 529	20 470
16	KOTA PADANG PANJANG	18 221	2 750	20 971
17	KOTA BUKITTINGGI	46 371	10 101	56 472
18	KOTA PAYAKUMBUH	39 008	5 920	44 928
19	KOTA PARIAMAN	26 782	3 534	30 316
SUMATERA BARAT		1 084 254	165 079	1 249 333

Sumber : SE 2016-Listing

<https://sumbar.biz>

**24. SENSUS EKONOMI 2016
(SE-2016)-LANJUTAN**

Tabel 24.1. Jumlah dan Persentase UMK dan UMB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2017

No.	KABUPATEN/KOTA	UMK	UMB	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	4 624	66	4 690
2.	KAB. PESISIR SELATAN	42 495	277	42 772
3.	KAB. SOLOK	37 115	325	37 440
4.	KAB. SIJUNJUNG	29 056	139	29 195
5.	KAB. TANAH DATAR	45 137	258	45 395
6.	KAB. PADANG PARIAMAN	43 576	256	43 832
7.	KAB. AGAM	56 592	293	56 885
8.	KAB. LIMA PULUH KOTA	47 549	248	47 797
9.	KAB. PASAMAN	25 981	156	26 137
10.	KAB. SOLOK SELATAN	15 559	77	15 636

bersambung...

Lanjutan Tabel 24.1

No.	Kabupaten/Kota	UMK	UMB	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	KAB. DHARMASRAYA	22 409	260	22 669
12.	KAB. PASAMAN BARAT	38 574	365	38 939
13.	KOTA PADANG	89 699	2 378	92 077
14.	KOTA SOLOK	9 843	212	10 055
15.	KOTA SAWAHLUNTO	8 719	59	8 778
16.	KOTA PADANG PANJANG	9 089	145	9 234
17.	KOTA BUKITTINGGI	22 200	523	22 723
18.	KOTA PAYAKUMBUH	18 996	391	19 387
19.	KOTA PARIAMAN	13 131	162	13 293
	Sumatera Barat	580 344	6 590	586 934

Sumber : SE2016-Lanjutan

Tabel 24.2. Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha, 2017

KATEGORI	UMK	UMB	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	8 043	122	8 165
C. Industri Pengolahan	87 492	204	87 696
F. Konstruksi	5 497	355	5 852
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	263 676	3 943	267 619
H. Pengangkutan dan Pergudangan	25 046	318	25 364
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	113 957	179	114 136
J. Informasi dan Komunikasi	13 442	155	13 597
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2 710	536	3 246
L. Real Estate	12 190	80	12 270

Bersambung....

Lanjutan Tabel 24.2

KATEGORI	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
MN. Jasa perusahaan	8 722	438	9 160
P. Pendidikan	15 551	160	15 711
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6 442	67	6 509
RS. Jasa Lainnya	17 576	33	17 609
Total	580 344	6 590	586 934

Sumber : SE2016-Lanjutan

Tabel 24.3. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja dan Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori di Provinsi Sumatera Barat, 2017

KATEGORI	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	R a t a - R a t a Penyerapan Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
BDE. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	8 043	14 827	2
C. Industri Pengolahan	87 492	195 786	2
F. Konstruksi	5 497	66 856	12
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	263 676	478 678	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	25 046	31 958	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	113 957	225 027	2
J. Informasi dan Komunikasi	13 442	20 801	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2 710	11 980	4
L. Real Estate	12 190	15 214	1

Bersambung....

Lanjutan Tabel 24.3

KATEGORI	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
MN. Jasa perusahaan	8 722	27 136	3
P. Pendidikan	15 551	157 612	10
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6 442	18 951	3
RS. Jasa Lainnya	17 576	32 846	2
Total	580 344	1 297 672	2

Sumber : SE2016-Lanjutan



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang
Telp. 0751-442158
website : sumbar.bps.go.id
email : sumbar@bps.go.id

ISBN 978-602-6544-49-0



9 786026 544490